

The background image shows a large, two-story government building with a prominent red-tiled roof and a central entrance. A white horse statue is positioned in front of the building. A stone sign in the foreground reads "DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP". The text is overlaid in a bold, red, outlined font.

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LkjIP)**

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-2 pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep. Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah

Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kabupaten Sumenep, Pebruari 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMENEP



Drs. FAJAR RAHMAN, M.Si

NIP. 19640521 199203 1 004

Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 2 |
| B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja | 3 |
| C. Isu Strategis Perangkat Daerah | 5 |
| D. Landasan Hukum | 6 |
| E. Sistematika | 7 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 9 |
| A. Rencana Strategis | 9 |
| B. Rencana Kinerja Tahun 2023 | 14 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 14 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 26 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 28 |
| B. Realisasi Anggaran | 51 |
| C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 54 |
| BAB IV PENUTUP | 61 |
| LAMPIRAN | xx |
| SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH | xx |
| MATRIKS RENSTRA | xx |
| SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA | xx |
| PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH | xx |

BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep mempunyai tugas : yang disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD secara teknis dan operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD yang terdiri dari 4 bagian yaitu Bagian Umum, bagian Program dan Keuangan, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan serta Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

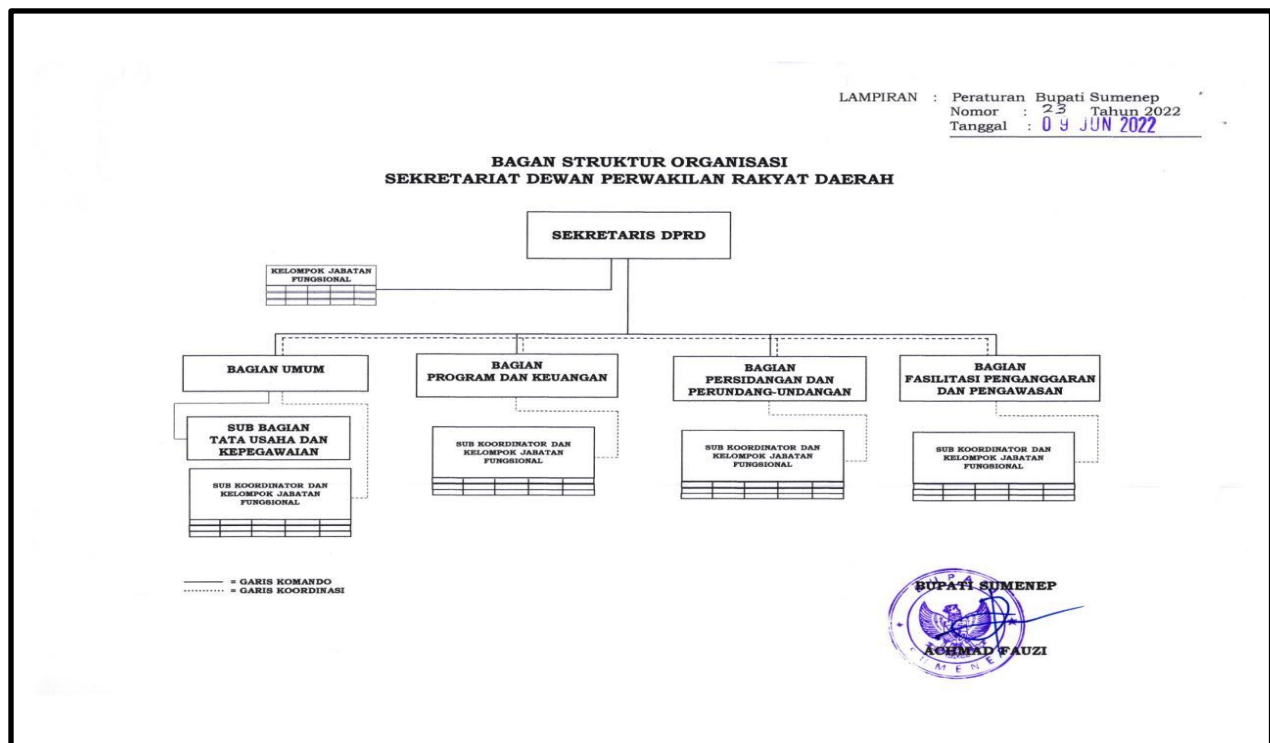
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep mempunyai fungsi :

1. Pemberian dukungan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Pemberian dukungan administrasi perencanaan dan keuangan DPRD;
3. Pemberian dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi;
4. Pemberian dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Sekretaris DPRD Kabupaten Sumenep sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian/Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Dilihat dari latar belakang pendidikan, kualifikasi teknis atau kompetensi di bidang administrasi, hukum, perencanaan dan keuangan belum sepenuhnya memadai karena pada umumnya masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA, selain itu kompetensi khusus/keahlian teknik yaitu tenaga notulensi dan tenaga akuntansi yang dimiliki pegawai juga masih sangat terbatas.

2. Masih terbatasnya sarana/prasarana perkantoran termasuk konstruksi bangunan Gedung DPRD saat ini yang mengalami kegagalan struktur bangunan sangat tidak layak ditempati untuk kegiatan rapat-rapat DPRD.
3. Belum terselenggaranya fasilitasi dukungan keahlian bagi DPRD berupa penyediaan tenaga ahli/kelompok pakar maupun staf ahli yang mempunyai tugas melakukan pendampingan dalam kegiatan pembahasan guna memenuhi kebutuhan substansif DPRD.
4. Masih terbatasnya penyediaan kebutuhan literatur peraturan perundangan yang sesuai dengan perkembangan.
5. Masih terbatasnya pendukung IT untuk memberikan informasi tentang kegiatan yang sedang dilakukan DPRD serta memudahkan akses masyarakat dalam menyampaikan pengaduan secara *online*.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Sumenep baru merupakan kebutuhan strategis yang harus di prioritaskan dalam progam dan kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Sumenep. Pada tahun 2023 sudah dilakukan peletakan batu pertama (Ground Breaking) Kantor DPRD Kab. Sumenep di daerah Desa Gedungan Sumenep
2. Sehubungan telah ditetapkannya Jabatan Fungsional (Jabfung) Sekretariat DPRD Kab. Sumenep maka perlu dilakukan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan maupun Bimbingan Teknis (Bintek) yang lebih berorientasi pada Kompetensi Spesifik sesuai Jabatan Fungsional yang di ampu pada masing-masing personil Sekretariat DPRD Kab. Sumenep.
3. Perubahan Regulasi pada Struktur Organisasi Perangkat Daerah khususnya penyetaraan Jabatan Struktural Eselon IV menjadi Jabatan Fungsional Ahli Muda menimbulkan persoalan pada penempatan keahlian personal di Sekretariat DPRD Kab. Sumenep terdapat beberapa Jabatan Fungsional ditempatkan pada Bagian-bagian yang tidak sesuai dengan keahlian dan Kompetensi yang melekat pada Jabatan Fungsional tersebut.

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 45 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023;
6. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 adalah :

| | |
|----------------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA |
| | Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah. |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA |
| | Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. |
| BAB IV | PENUTUP |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan pembangunan yang merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dengan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

“Sumenep Unggul, Mandiri Dan Sejahtera”

MISI :

- Misi 1 : Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan.
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.
- Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
- Misi 4 : Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifan Lokal.
- Misi 5 : Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berbasis Lingkungan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) **Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep** berdasarkan tugas dan fungsi mengacu kepada RPJMD yaitu Misi ke 3 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang diterfensi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Yang Diintervensi

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep

| NO | MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA |
|-----|---|---|---|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Misi 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif dan responsif dalam melayani masyarakat | Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yg akuntabel, tanggap dan inovatif. | 1. Meningkatnya layanan publik yang inovatif berbasis e-government 2. Pengembangan kapasitas aparatus sipil negara (ASN) pemerintah daerah. 3. Terwujudnya birokrasi yang akuntabel dan transparan. | 1. Indeks SPBE 2. Nilai IKM 3. Indeks profesionalisme aparatur 4. Nilai SAKIP 5. Opini atas audit BPK 6. Tingkat maturitas SPIP |

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra, indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran

diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberhasilan sasaran RPJMD yang diinterfensi Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | |
|-----|--|--|--------------------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Meningkatkan kualitas pelayanan publik | Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD | Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD | 80,65 | 81,15 | 81,65 | 82,15 | 82,65 |

Sumber : Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep periode 2021-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator

Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep

| NO | TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN | | |
|----|---|---|--------|---|--|---|
| | | | | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA |
| 1. | Meningkatkan Kualitas Layanan Publik / Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD | 1.1 Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Publik / Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD | Nilai | <p>Nilai (hasil Survei) terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan.</p> <p>Nilai Survey Kepuasan Masyarakat diformulasikan dengan satuan nilai yang diperoleh dari Hasil Survey terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat atas Layanan Sekretariat DPRD. Dalam Penyusunan Survey ini dilakukan terhadap 3 Responden yang terdiri dari Pimpinan dan Anggota DPRD, Elemen Masyarakat dan Aparatur Pegawai di Lingkungan Sekretariat DPRD</p> | <p>1. Bobot Nilai Tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$</p> <p>2. SKM = $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$</p> <p>3. SKM Unit Pelayanan x 25</p> | Laporan Akhir SKM Sekretariat DPRD Kab. Sumenep |

Sumber : Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 :

Tabel 2.4
Rencana Kerja Tahun 2023
Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep

| NO | TUJUAN | SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | SAT. | TARGET |
|-----|--------------------------------------|---------|--|--|--------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Layanan Publik | | | Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Publik | | |
| | | 1.1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Nilai IKM DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD | Nilai | 81,15 |
| | | 1.2 | Meningkatnya Capaian Kinerja Sekretariat DPRD | Persentase Capaian Kinerja Sekretariat DPRD | Persentase % | 90 |

Sumber : Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2023

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan

dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 25 Januari 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kabupaten Sumenep.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 20 bulan November tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan alokasi anggaran dan Sub Kegiatan. Berikut perjanjian kinerja setelah dan sebelum perubahan :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | |
|----|--|--|--------|-------------------|-------------------|
| | | | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Meningkatnya Kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Nilai IKM DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD | Nilai | 81,15 | 81,15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|-----|-----|
| 2 | Meningkatnya Capaian Kinerja Sekretariat DPRD | Persentase Capaian Kinerja Sekretariat DPRD | % | 90% | 90% |
|---|---|---|---|-----|-----|

Sumber : Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep :

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Sumenep
Sebelum dan Sesudah Perubahan Tahun 2023

| NO. | PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | ANGGARAN | |
|-----|---|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN | SEBELUM PERUBAHAN | SETELAH PERUBAHAN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Sekretariat DPRD | | | | 63.403.123.947 | 69.707.022.658 |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kab/Kota yang terpenuhi | 100 | 100 | 42.148.533.072 | 45.427.454.731 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah | 18 | 18 | 60.754.150 | 110.754.150 |
| 1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah | 4 | 4 | 9.283.099 | 9.283.099 |
| 1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen | 1 | 1 | 4.861.550 | 4.861.550 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|------------|------------|----------------------|----------------------|
| 1.3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 | 1 | 4.437.410 | 4.437.410 |
| 1.4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 | 1 | 4.456.050 | 4.456.050 |
| 1.5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 | 1 | 4.439.574 | 4.439.574 |
| 1.6 | Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 | 4 | 29.890.412 | 79.890.412 |
| 1.7 | Evaluasi Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 | 6 | 3.386.055 | 3.386.055 |
| 2 | Administrasi Keuangan Daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah | 109 | 109 | 6.385.997.735 | 6.655.997.735 |
| 2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 65 | 65 | 6.375.058.907 | 6.645.058.907 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-----------|-----------|--------------------|--------------------|
| 2.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 44 | 44 | 10.938.828 | 10.938.828 |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pemenuhan administrasi kepegawaian daerah | 18 | 18 | 193.104.240 | 283.509.440 |
| 3.1 | Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 2 | 2 | 103.528.240 | 128.596.240 |
| 3.2 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 16 | 16 | 89.576.000 | 154.913.200 |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah | 47 | 47 | 530.591.605 | 839.815.344 |
| 4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 10 | 10 | 24.449.900 | 30.396.500 |
| 4.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 | 5 | 149.273.355 | 427.575.494 |
| 4.3 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 6 | 6 | 74.216.350 | 99.191.350 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| 4.4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 | 12 | 181.072.000 | 181.072.000 |
| 4.5 | Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 14 | 14 | 101.580.000 | 101.580.000 |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 16 | 28 | 215.860.932 | 791.916.433 |
| 6.1 | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | 0 | 1 | - | 532.099.701 |
| 6.2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | 16 | 28 | 215.860.932 | 259.816.732 |
| 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan | 28 | 28 | 1.314.963.529 | 1.302.463.529 |
| 7.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | 12 | 3.690.417 | 3.690.417 |
| 7.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 12 | 470.722.800 | 458.222.800 |
| 7.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 | 4 | 840.550.312 | 840.550.312 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan | 113 | 113 | 851.528.490 | 929.507.277 |
| 8.1 | Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 41 | 41 | 618.736.000 | 642.350.840 |
| 8.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 | 5 | 16.869.200 | 16.869.200 |
| 8.3 | Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | 5 | 5 | 165.829.290 | 211.173.237 |
| 8.4 | Pemeliharaan/Rehab Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | 62 | 62 | 50.094.000 | 59.114.000 |
| 9 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang disediakan | 102 | 106 | 28.361.980.725 | 29.542.019.817 |
| 9.1 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 50 | 50 | 27.964.128.105 | 28.411.460.697 |
| 9.2 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 2 | 6 | 242.924.000 | 951.255.500 |

| | | | | | | |
|------|---|---|------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 9.3 | Pelaksanaan Medical Check up | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 50 | 50 | 154.928.620 | 179.303.620 |
| 10 | Layanan Administrasi DPRD | Jumlah Layanan Administrasi DPRD yang disediakan | 21 | 21 | 4.233.751.666 | 4.971.471.006 |
| 10.1 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 20 | 20 | 4.033.884.400 | 4.771.603.740 |
| 10.2 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Rumah Tangga DPRD yang disediakan | 1 | 1 | 199.867.266 | 199.867.266 |
| II | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Prosentase pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi | 100 | 100 | 21.254.590.875 | 24.279.567.927 |
| 1 | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD | 15 | 15 | 5.958.345.880 | 6.574.287.880 |
| 1.1 | Penyusunan dan Pembentukan Program Pembahasan Perda | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembentukan Program Pembahasan Perda | 1 | 1 | 3.631.981.100 | 3.373.596.300 |
| 1.2 | Pembahasan Rancangan perda | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 8 | 8 | 1.338.890.000 | 2.228.421.200 |
| 1.3 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | 1 | 1 | 364.839.380 | 349.634.980 |
| 1.4 | Fasilitasi Penyusunan/Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan /Keterangan Naskah Akademik | 4 | 4 | 605.687.800 | 605.687.800 |

| | | | | | | |
|-----|--|---|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| 1.5 | Penyusunan Tata tertib | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun | 1 | 1 | 16.947.600 | 16.947.600 |
| 2 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan kebijakan anggaran yang terfasilitasi | 5 | 5 | 3.356.759.050 | 4.226.193.250 |
| 2.1 | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | 1 | 1 | 785.901.400 | 785.901.400 |
| 2.2 | Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS | 1 | 1 | 708.783.950 | 1.021.289.350 |
| 2.3 | Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 1 | 1 | 144.604.400 | 757.607.800 |
| 2.4 | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | 1 | 1 | 724.919.300 | 724.919.300 |
| 2.5 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 | 1 | 992.550.000 | 936.475.400 |
| 3 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi | 64 | 64 | 1.593.813.000 | 1.243.698.000 |
| 3.1 | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 16 | 16 | 299.300.400 | 270.645.400 |
| 3.2 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur | 16 | 16 | 450.794.700 | 330.979.700 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| 3.3 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 16 | 16 | 432.569.900 | 352.049.900 |
| 3.4 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Perekonomian | 16 | 16 | 411.148.000 | 290.023.000 |
| 4 | Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi | 86 | 86 | 2.787.485.180 | 3.549.479.380 |
| 4.1 | Bimtek DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 3 | 3 | 1.362.265.600 | 1.843.614.400 |
| 4.2 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 69 | 69 | 1.048.491.200 | 1.329.136.600 |
| 4.3 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 4 | 4 | 102.080.436 | 102.080.436 |
| 4.4 | Penyediaan tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 10 | 10 | 179.126.224 | 179.126.224 |
| 4.5 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 12 | 12 | 95.521.720 | 95.521.720 |
| 5 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumlah pelaksanaan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang terfasilitasi | 53 | 53 | 3.043.283.333 | 3.929.420.905 |
| 5.1 | Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun | 50 | 50 | 434.862.618 | 101.275.418 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| 5.2 | Pelaksanaan Reses | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 3 | 3 | 2.608.420.715 | 3.828.145.487 |
| 6 | Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang terfasilitasi | 1 | 1 | 847.086.700 | 716.388.980 |
| 6.1 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 | 1 | 847.086.700 | 716.388.980 |
| 7 | Pembahasan Kerja sama Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kerja Sama Daerah yang terfasilitasi | 36 | 48 | 435.919.600 | 572.341.600 |
| 7.1 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Jumlah Dokumen Bahan Komuniikasi dan Publikasi yang disusun | 36 | 48 | 435.919.600 | 572.341.600 |
| 8 | Fasilitasi Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD | 17 | 17 | 3.231.898.132 | 3.467.757.932 |
| 8.1 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 5 | 5 | 1.685.027.493 | 1.577.067.093 |
| 8.2 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 12 | 12 | 1.546.870.639 | 1.890.690.839 |

Sumber : DPA dan DPA Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III
...
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengemban amanah Masyarakat. Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep yang diintervensi.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengkategorian Capaian Kinerja

| No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1 | Sangat Tinggi | $91 \leq 100$ |
| 2 | Tinggi | $76 \leq 90$ |
| 3 | Sedang | $66 \leq 75$ |
| 4 | Rendah | $51 \leq 65$ |
| 5 | Sangat Rendah | ≤ 50 |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023

| No. | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori | Sumber Data |
|-----|---|---|--------|-----------|--------------|---------------|------------------|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Layanan Publik / Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD | Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Publik / Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD | 81,15 | 81,27 | 100,14% | Sangat Tinggi | Sekretariat DPRD |

Uraian penjelasan tabel :

Adanya realisasi kinerja pada Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD Tahun 2023 yang melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 100,14% disebabkan beberapa kenaikan nilai kepuasan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD diantaranya Kenaikan Nilai Pelayanan Rapat DPRD yang memiliki persentase nilai sebesar 80,49% kemudian kenaikan pada nilai pelayanan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang memiliki persentase sebesar 86,54%.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | 2022 | | | 2023 | | |
|-----|---|---|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Layanan Publik / Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD | Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Publik / Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD | 80,65 | 80,71 | 100,07 % | 81,15 | 81,27 | 100,14% |

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan hasil perbandingan terhadap nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 sebesar 80,71 dan Hasil Analisis terhadap Survey Hasil Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 sebesar 81,27 maka terdapat kenaikan sebesar 0,07 % . Kenaikan realisasi tersebut disebabkan adanya nilai Kepuasan Masyarakat yang meningkat khususnya pada Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD yakni sebesar 81,43. Disamping itu terdapat kenaikan pada nilai Indeks

Kepuasan Internal Sekretariat DPRD terhadap Pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD yakni sebesar 81,51.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Target Akhir 2026 | Tingkat Kemajuan |
|-----|---|---|------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/5*100 |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Layanan Publik / Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD | Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Publik / Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD | 81,27 | 82,65 | 98,33 |

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan analisa terhadap hasil nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Sumenep Tahun 2023 yang merupakan tahun ke-2 pada pelaksanaan Renstra, maka dapat diperoleh nilai Perbandingan antara realisasi nilai IKM Sekretariat DPRD Tahun 2023 dibandingkan dengan nilai Target IKM Sekretariat DPRD Tahun 2026 yakni sebesar 98,33. Untuk mencapai target 100% di Tahun Akhir Renstra maka diperlukan beberapa langkah perbaikan dan penyempurnaan terhadap pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD khususnya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep. Disamping itu perlu juga dilakukan usaha peningkatan pelayanan terhadap layanan Penyediaan Kebutuhan Internal Sekretariat DPRD serta Layanan Penanganan Pengaduan Masyarakat upaya peningkatan Pelayanan terhadap tiga komponen tersebut pada akhirnya akan

memberikan kontribusi terhadap kenaikan nilai IKM Sekretariat DPRD secara signifikan.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standart nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten
Sumenep lain

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2023 | Standar Nasional | % Capaian |
|-----|---|---|----------------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/5*100 |
| 1 | Meningkatkan Kualitas Layanan Publik / Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD | Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Publik / Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD | 81,27 | - | - |

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

| No. | Tujuan/Sasaran /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Analisis Keberhasilan/ Kegagalan | Solusi yang dilakukan |
|-----|--|--|--------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------------------|
| I | Meningkatkan Kualitas Layanan Publik | Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Publik | 86 | 81,27 | 94.5% | | |
| II | Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD | Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD | 81,15 | 81,27 | 100,14% | | |

| | | | | | | |
|-----|---|--|-----|-------|--------|---|
| III | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | Presentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kab/Kota yang terpenuhi | 100 | 99,38 | 99,38 | Secara rata-rata telah mencapai target yang telah ditetapkan sehingga terpenuhi |
| | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah | 18 | 18 | 100,00 | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah | 4 | 4 | 100,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen | 1 | 1 | 100,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 | 1 | 100,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 | 1 | 100,00 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 | 1 | 100,00 | |
| | Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan | 4 | 4 | 100,00 | |

| | | | | | |
|---|--|------------|------------|---------------|--|
| | Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | |
| Evaluasi Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 | 6 | 100,00 | |
| Administrasi Keuangan Daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah | 109 | 109 | 100 | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 65 | 65 | 100,00 | |
| Koordiansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 44 | 44 | 100,00 | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pemenuhan administrasi kepegawaian daerah | 19 | 19 | 100,00 | |
| Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 3 | 3 | 100,00 | |
| Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 16 | 16 | 100,00 | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah | 47 | 47 | 100,00 | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | 10 | 10 | 100,00 | |

| | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|---------------|--|
| | Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 | 5 | 100,00 | |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 6 | 6 | 100,00 | |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 | 12 | 100,00 | |
| Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 14 | 14 | 100,00 | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 28 | 28 | 100,00 | |
| Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | 1 | 1 | 100,00 | |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | 28 | 28 | 100,00 | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan | 28 | 28 | 100,00 | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | 12 | 100,00 | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 12 | 100,00 | |

| | | | | | |
|--|--|---|------------|------------|---------------|
| Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 | 4 | 100,00 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan | 113 | 112 | 99,12 |
| Penyediaan pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Jabatan | Jasa biaya Pemeliharaan dan Perorangan Dinas atau Jabatan | Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 41 | 40 | 97,56 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 | 5 | 100,00 |
| Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | 5 | 5 | 100,00 |
| Pemeliharaan/Rehab Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan/Rehab Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | 62 | 62 | 100,00 |
| Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang disediakan | 106 | 101 | 95,28 |
| Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 50 | 50 | 100,00 |
| Penyediaan Dinas dan Atribut DPRD | Penyediaan Pakaian dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 6 | 6 | 100,00 |
| Pelaksanaan Check up | Medical Check up | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 50 | 45 | 90,00 |
| Layanan Administrasi DPRD | Layanan Administrasi | Jumlah Layanan Administrasi | 21 | 21 | 100,00 |

| | | | | | | |
|---|-----------|--|------------|--------------|---------------|---|
| | | DPRD yang disediakan | | | | |
| Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Rapat dan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 20 | 20 | 100,00 | |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | | Jumlah Paket Rumah Tangga DPRD yang disediakan | 1 | 1 | 100,00 | |
| Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | | Prosentase pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi | 100 | 96,16 | 96,16 | Secara rata-rata telah mencapai target yang telah ditetapkan, namun ada sub kegiatan yang belum mencapai target yang ditetapkan |
| Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | | Jumlah Dokumen Hasil pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD | 15 | 15 | 100,00 | |
| Penyusunan dan Pembentukan Program Pembahasan Perda | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembentukan Program Pembahasan Perda | 1 | 1 | 100,00 | |
| Pembahasan Rancangan perda | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 8 | 8 | 100,00 | |
| Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan | | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | 1 | 1 | 100,00 | |
| Fasilitasi Penyusunan/Naskah Akademik | | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan /Keterangan Naskah Akademik | 4 | 4 | 100,00 | |
| Penyusunan Tata tertib | | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun | 1 | 1 | 100,00 | |
| Pembahasan Kebijakan Anggaran | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan kebijakan anggaran yang terfasilitasi | 5 | 5 | 100,00 | |
| Pembahasan KUA dan PPAS | | Jumlah Dokumen Hasil | 1 | 1 | 100,00 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|------------|--------------|--|
| | | Pembahasan KUA dan PPAS | | | | |
| | Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS | 1 | 1 | 100,00 | |
| | Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 1 | 1 | 100,00 | |
| | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | 1 | 1 | 100,00 | |
| | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 | 1 | 100,00 | |
| | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi | 64 | 29 | 45,31 | |
| | Pengawasan Pemerintahan dan Hukum | Urusan bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 16 | 6 | 37,50 | |
| | Pengawasan Pemerintahan Infrastruktur | Urusan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur | 16 | 7 | 43,75 | |
| | Pengawasan Pemerintahan Kesejahteraan Masyarakat | Urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 16 | 7 | 43,75 | |
| | Pengawasan Pemerintahan Perekonomian | Urusan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Perekonomian | 16 | 9 | 56,25 | |
| | Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi | 96 | 119 | 96,55 | |
| | Bimtek DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 4 | 4 | 100,00 | |
| | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, | 69 | 69 | 100,00 | |

| | | | | | |
|--|--------------|--|-----------|-----------|---------------|
| | | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | | | |
| Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 4 | 4 | 100,00 |
| Penyediaan tenaga Ahli Fraksi | | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 7 | 7 | 100,00 |
| Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 12 | 35 | 291,67 |
| Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | | Jumlah pelaksanaan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang terfasilitasi | 53 | 53 | 100,00 |
| Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD | | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun | 50 | 50 | 100,00 |
| Pelaksanaan Reses | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 3 | 3 | 100,00 |
| Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang terfasilitasi | 1 | 1 | 100,00 |
| Pengawasan Kode Etik DPRD | | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 | 1 | 100,00 |
| Pembahasan Kerja sama Daerah | | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kerja Sama Daerah yang terfasilitasi | 48 | 48 | 100,00 |
| Penyusunan Komunikasi dan Publikasi | Bahan dan | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun | 48 | 48 | 100,00 |
| Fasilitasi DPRD | Tugas | Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD | 17 | 17 | 100,00 |
| Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan DPRD | dan Tugas | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi | 5 | 5 | 100,00 |

| | | | | | | |
|--|---|--|----|----|--------|--|
| | | Pelaksanaan Tugas DPRD | | | | |
| | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 12 | 12 | 100,00 | |

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan realisasi Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 maka dapat diketahui capaian keberhasilan pelaksanaan program, kegiatandan sub kegiatan pada Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yakni sebesar 97,77%. Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 yang sebesar 95,04% maka terdapat kenaikan Indikator Kinerja sebesar 2,73%. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Sekretariat DPRD Kab. Sumenep.

Meski demikian terdapat beberapa Indikator penurunan relalisasi kinerja yang tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Pada program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD khususnya kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan pada 4 sub kegiatan yakni :

1. Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum, ditargetkan sebanyak 16 Dokumen dan terealisasi sebanyak 6 Dokumen atau secara rata-rata sebesar 37,50%
2. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, ditargetkan sebanyak 16 Dokumen dan terealisasi sebanyak 7 Dokumen atau secara rata-rata sebesar 43,75%
3. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Masyarakat, ditargetkan sebanyak 16 Dokumen dan terealisasi sebanyak 7 Dokumen atau secara rata-rata sebesar 43,75%
4. Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian ditargetkan sebanyak 16 Dokumen dan terealisasi sebanyak 9 Dokumen atau secara rata-rata sebesar 56,25%

Indikasi penurunan Indikator realisasi kinerja pada kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan secara umum dikarenakan adanya Intensitas dan frekuensi kegiatan konsultasi dan koordinasi DPRD Kabupaten Suemnep yang lebih sering dilaksanakan daripada frekuensi koordinasi dan konsultasi dalam daerah. Kegiatan perjalanan dinas dalam daerah yang mengalami penurunan ini khususnya pada kegiatan pengawasan dalam daerah DPRD. Kecenderungan Pimpinan dan Anggota DPRD yang lebih memilih kegiatan koordinasi dan konsultasi luar daerah menyebabkan penurunan pada kegiatan Perjalanan dinas dalam daerah termasuk didalamnya kegiatan pengawasan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | % Capaian | Menunjang/Tidak Menunjang |
|-----|--|--|-----------|---|--|-----------|---|
| 1 | Meningkatkan Kualitas Layanan Publik | Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Publik | | | | | |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD | Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD | 81,27 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kab/Kota yang terpenuhi | 97,85 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat daerah | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--------------|---|
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Evaluasi Kerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Administrasi Keuangan Daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah | 86,24 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---------------|---|
| | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 76,92 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Koordiansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah Pemenuhan administrasi kepegawaian daerah | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Pemenuhan penyediaan administrasi umum perangkat daerah | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------|---|
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Pengadaan Mebel | Pengadaan Mebel | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang | 99,12 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------|---|
| | | | | | Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan | | |
| | | | | Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 97,56 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Pemeliharaan/Rehab Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang disediakan | 95,28 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Pelaksanaan Medical Check up | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | 90,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Layanan Administrasi DPRD | Jumlah Layanan Administrasi DPRD yang disediakan | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi | 100,00 | Menunjang Keberhasilan |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---------------|---|
| | | | | | Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | Program dan Kegiatan |
| | | | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Jumlah Paket Rumah Tangga DPRD yang disediakan | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | Prosentase pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD yang terfasilitasi | 92,27 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Penyusunan dan Pembentukan Program Pembahasan Perda | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembentukan Program Pembahasan Perda | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Pembahasan Rancangan perda | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Fasilitasi Penyusunan/Naskah Akademik | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan /Keterangan Naskah Akademik | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Penyusunan Tata tertib | Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan kebijakan anggaran yang terfasilitasi | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--------------|---|
| | | | | Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan | KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi | 45,31 | Tidak Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 37,50 | Tidak Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Infrastruktur | 43,75 | Tidak Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Kesejahteraan Rakyat | 43,75 | Tidak Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Bidang Perekonomian | 56,25 | Tidak Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Peningkatan Kapasitas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil peningkatan kapasitas DPRD yang difasilitasi | 96,55 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------|---|
| | | | Bimtek DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | Penyediaan tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 291,67 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Jumlah pelaksanaan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang terfasilitasi | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | Pelaksanaan Reses | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang terfasilitasi | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | Pembahasan Kerja sama Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Kerja Sama | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---------------|---|
| | | | | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Daerah yang terfasilitasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang disusun | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Fasilitasi Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Fasilitasi Tugas DPRD | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |
| | | | | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 100,00 | Menunjang Keberhasilan Program dan Kegiatan |

Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan dari hasil uraian tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa Realisasi Pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian pernyataan kinerja yaitu didukung oleh keberhasilan pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas Sekretariat DPRD. Pada Program Dukungan terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD khususnya pada sub kegiatan Penyusunan dan Pembentukan Program Pembahasan Perda, Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Pelaksanaan Reses berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tercapainya indikator Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD didukung oleh optimalnya capaian program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan indikator Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota yang terpenuhi yang ditargetkan 100% terealisasi 97,85% dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dengan Indikator Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, Keberhasilan kinerja program tersebut didukung oleh kinerja kegiatan yang ditargetkan 100% terealisasi 93,16%.

Hal ini disebabkan tercapainya kinerja sub kegiatan dari Sub Kegiatan Prioritas Sekretariat DPRD yaitu :

1. Sub kegiatan Penyusunan dan Pembentukan Program dan Pembahasan Perda yang ditargetkan sebanyak 1 Dokumen dan terealisasi sebanyak 1 Dokumen. Keberhasilan tercapainya kinerja sub kegiatan ini yaitu Dokumen Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 188/152/435.050/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Suemnep Tahun 2023 sebanyak 1 Dokumen.

Diantaranya Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa sebanyak 19 usulan yaitu :

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan masyarakat;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Garis Sempadan pantai;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Parkir;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusatamaan Gender;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan Darat;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Reforma Agraria;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Wawasan Kebangsaan;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Air Permukaan Bagi Usaha Tambak Udang;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah

Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah Usul Pemerintah Daerah diantaranya :

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Sumekar;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertembakauan;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan keris;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Sub kegiatan Pembahasan Rancangan Perda ditargetkan sebanyak 8 Dokumen dan terealisasi sebanyak 8 Dokumen yaitu

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
 - Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022
 - Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
 - Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
3. Sub kegiatan Pelaksanaan Reses yang ditargetkan sebanyak 3 Dokumen dan Terealisasi sebanyak 3 Dokumen. Dimana pada Tahun 2023 DPRD Kab. Sumenep telah melaksanakan Kegiatan Reses sebanyak 3 kali di daerah Pemilihan masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Sumenep

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian |
|-----|---|----------------|----------------|-----------|
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | 45.427.454.731 | 43.513.969.234 | 95,44 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 110.754.150 | 104.938.400 | 94,75 |
| 1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9.283.099 | 8.355.000 | 90,00 |
| 1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 4.861.550 | 4.523.700 | 93,05 |
| 1.3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 4.437.410 | 3.961.000 | 89,26 |
| 1.4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 4.456.050 | 2.187.200 | 49,08 |
| 1.5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 4.439.574 | 4.234.000 | 95,37 |
| 1.6 | Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 79.890.412 | 79.247.500 | 99,20 |
| 1.7 | Evaluasi Kerja Perangkat Daerah | 3.386.055 | 2.430.000 | 71,76 |

| | | | | |
|------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 2 | Administrasi Keuangan Daerah | 6.655.997.735 | 6.453.984.141 | 96,96 |
| 2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 6.645.058.907 | 6.443.064.141 | 96,96 |
| 2.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 10.938.828 | 10.920.000 | 99,83 |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 283.509.440 | 276.114.600 | 97,39 |
| 3.1 | Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya | 128.596.240 | 122.794.400 | 95,49 |
| 3.2 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | 154.913.200 | 153.320.200 | 98,97 |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 839.815.344 | 768.385.693 | 91,49 |
| 4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 30.396.500 | 30.120.600 | 99,09 |
| 4.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 427.575.494 | 409.090.500 | 95,68 |
| 4.3 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 99.191.350 | 95.448.000 | 96,23 |
| 4.4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan | 181.072.000 | 133.686.093 | 73,83 |
| 4.5 | Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 101.580.000 | 100.040.500 | 98,48 |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 791.916.433 | 784.200.400 | 99,03 |
| 6.1 | Pengadaan Mebel | 532.099.701 | 527.464.400 | 99,13 |
| 6.2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya | 259.816.732 | 256.736.000 | 98,81 |
| 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.302.463.529 | 1.143.470.894 | 87,79 |
| 7.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.690.417 | 1.618.500 | 43,86 |
| 7.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 458.222.800 | 355.708.130 | 77,63 |
| 7.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 840.550.312 | 786.144.264 | 93,53 |
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 929.507.277 | 896.762.133 | 96,48 |
| 8.1 | Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan | 642.350.840 | 615.575.324 | 95,83 |
| 8.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 16.869.200 | 14.979.500 | 88,80 |
| 8.3 | Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 211.173.237 | 207.258.259 | 98,15 |
| 8.4 | Pemeliharaan/Rehab Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 59.114.000 | 58.949.050 | 99,72 |
| 9 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 29.542.019.817 | 28.121.930.679 | 95,19 |
| 9.1 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 28.411.460.697 | 27.066.650.435 | 95,27 |
| 9.2 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 951.255.500 | 897.741.000 | 94,37 |
| 9.3 | Pelaksanaan Medical Check up | 179.303.620 | 157.539.244 | 87,86 |
| 10 | Layanan Administrasi DPRD | 4.971.471.006 | 4.964.182.294 | 99,85 |
| 10.1 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 4.771.603.740 | 4.764.415.540 | 99,85 |
| 10.2 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | 199.867.266 | 199.766.754 | 99,95 |
| II | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 24.279.567.927 | 22.969.956.634 | 91,23 |
| 1 | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 6.574.287.880 | 6.485.421.518 | 98,65 |
| 1.1 | Penyusunan dan Pembentukan Program Pembahasan Perda | 3.373.596.300 | 3.343.403.600 | 99,11 |
| 1.2 | Pembahasan Rancangan perda | 2.228.421.200 | 2.209.878.534 | 99,17 |

| | | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1.3 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan | 349.634.980 | 321.927.284 | 92,08 |
| 1.4 | Fasilitasi Penyusunan/Naskah Akademik | 605.687.800 | 596.478.600 | 98,48 |
| 1.5 | Penyusunan Tata tertib | 16.947.600 | 13.733.500 | 81,04 |
| 2 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | 4.226.193.250 | 4.053.081.062 | 95,90 |
| 2.1 | Pembahasan KUA dan PPAS | 785.901.400 | 780.058.600 | 99,26 |
| 2.2 | Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan | 1.021.289.350 | 1.004.329.800 | 98,34 |
| 2.3 | Pembahasan APBD | 757.607.800 | 752.510.700 | 99,33 |
| 2.4 | Pembahasan APBD Perubahan | 724.919.300 | 687.189.100 | 94,80 |
| 2.5 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 936.475.400 | 828.992.862 | 88,52 |
| 3 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 1.243.698.000 | 744.936.680 | 59,90 |
| 3.1 | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | 270.645.400 | 152.637.600 | 56,40 |
| 3.2 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 330.979.700 | 193.427.100 | 58,44 |
| 3.3 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Masyarakat | 352.049.900 | 221.076.480 | 62,80 |
| 3.4 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 290.023.000 | 177.795.500 | 61,30 |
| 4 | Peningkatan Kapasitas DPRD | 3.549.479.380 | 3.378.373.069 | 95,18 |
| 4.1 | Bimtek DPRD | 1.843.614.400 | 1.780.979.700 | 96,60 |
| 4.2 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 1.329.136.600 | 1.268.066.369 | 95,41 |
| 4.3 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 102.080.436 | 96.584.000 | 94,62 |
| 4.4 | Penyediaan tenaga Ahli Fraksi | 179.126.224 | 169.525.000 | 94,64 |
| 4.5 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 95.521.720 | 63.218.000 | 66,18 |
| 5 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 3.929.420.905 | 3.643.171.400 | 92,72 |
| 5.1 | Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD | 101.275.418 | 94.584.500 | 93,39 |
| 5.2 | Pelaksanaan Reses | 3.828.145.487 | 3.548.586.900 | 92,70 |
| 6 | Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD | 716.388.980 | 670.604.331 | 93,61 |
| 6.1 | Pengawasan Kode Etik DPRD | 716.388.980 | 670.604.331 | 93,61 |
| 7 | Pembahasan Kerja sama Daerah | 572.341.600 | 539.447.000 | 94,25 |
| 7.1 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | 572.341.600 | 539.447.000 | 94,25 |
| 8 | Fasilitasi Tugas DPRD | 3.467.757.932 | 3.454.921.574 | 99,63 |
| 8.1 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 1.577.067.093 | 1.568.943.231 | 99,48 |
| 8.2 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 1.890.690.839 | 1.885.978.343 | 99,75 |

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | | | Anggaran | | | Tingkat Efisiensi |
|-----|--|-------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------|-------------------|
| | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran | Realisasi | % Capaian | |
| | | | | | (Rp.) | (Rp.) | | |
| I | Meningkatkan Kualitas Layanan Publik | | | | | | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD | 81,15 | 81,27 | 100,14 % | 69.707.022.658 | 66.483.925.868 | 95,38% | 4,76 |

Uraian penjelasan tabel :

Dengan mengacu pada data realisasi Anggaran dan realisasi kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2023 maka dapat diperbandingkan bahwa realisasi Anggaran yang persentasenya sebesar 95,38% dengan realisasi Indikator Kinerja yang persentasenya sebesar 100,14% maka diperoleh selisih sebesar 4,76. Berdasarkan perhitungan selisih tersebut dapat diketahui bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep memiliki Tingkat Efisiensi melebihi nilai 1.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

| No | Program/ kegiatan | Indikator Kinerja | | | Anggaran | | | Tingkat Efisiensi |
|----------|--|-------------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian | |
| I | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota | 100 | 52 | 97,85 | 45.427.454.731 | 43.513.969.234 | 95,44 | 2,41 |
| 1 | Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 18 | 18 | 100,00 | 110.754.150 | 104.938.400 | 94,75 | 5,25 |
| 1.1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 | 4 | 100,00 | 9.283.099 | 8.355.000 | 90,00 | 10,00 |
| 1.2 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | 1 | 1 | 100,00 | 4.861.550 | 4.523.700 | 93,05 | 6,95 |
| 1.3 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD | 1 | 1 | 100,00 | 4.437.410 | 3.961.000 | 89,26 | 10,74 |
| 1.4 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD | 1 | 1 | 100,00 | 4.456.050 | 2.187.200 | 49,08 | 50,92 |
| 1.5 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 1 | 1 | 100,00 | 4.439.574 | 4.234.000 | 95,37 | 4,63 |
| 1.6 | Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 | 4 | 100,00 | 79.890.412 | 79.247.500 | 99,20 | 0,8 |
| 1.7 | Evaluasi Kerja Perangkat Daerah | 6 | 6 | 100,00 | 3.386.055 | 2.430.000 | 71,76 | 28,24 |
| 2 | Administrasi Keuangan Daerah | 109 | 86,24 | 86,24 | 6.655.997.735 | 6.453.984.141 | 96,96 | -10,72 |
| 2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 65 | 65 | 76,92 | 6.645.058.907 | 6.443.064.141 | 96,96 | -20,04 |
| 2.2 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan | 44 | 44 | 100,00 | 10.938.828 | 10.920.000 | 99,83 | 0,17 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|--|-------|
| | Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD | | | | | | | | |
| 3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 18 | 100,00 | 100,00 | 283.509.440 | 276.114.600 | 97,39 | | 2,61 |
| 3.1 | Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Perlengkapannya | 3 | 3 | 100,00 | 128.596.240 | 122.794.400 | 95,49 | | 4,51 |
| 3.2 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi | 16 | 16 | 100,00 | 154.913.200 | 153.320.200 | 98,97 | | 1,03 |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 47 | 100,00 | 100,00 | 839.815.344 | 768.385.693 | 91,49 | | 8,51 |
| 4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10 | 10 | 100,00 | 30.396.500 | 30.120.600 | 99,09 | | 0,91 |
| 4.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5 | 5 | 100,00 | 427.575.494 | 409.090.500 | 95,68 | | 4,32 |
| 4.3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 6 | 6 | 100,00 | 99.191.350 | 95.448.000 | 96,23 | | 3,77 |
| 4.4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- undangan | 12 | 12 | 100,00 | 181.072.000 | 133.686.093 | 73,83 | | 26,17 |
| 4.5 | Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 14 | 14 | 100,00 | 101.580.000 | 100.040.500 | 98,48 | | 1,52 |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 28 | 100,00 | 100,00 | 791.916.433 | 784.200.400 | 99,03 | | 0,97 |
| 6.1 | Pengadaan Mebel | 1 | 1 | 100,00 | 532.099.701 | 527.464.400 | 99,13 | | 0,87 |
| 6.2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan bangunan Lainnya | 28 | 28 | 100,00 | 259.816.732 | 256.736.000 | 98,81 | | 1,19 |
| 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 28 | 100,00 | 100,00 | 1.302.463.529 | 1.143.470.894 | 87,79 | | 12,21 |
| 7.1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 | 12 | 100,00 | 3.690.417 | 1.618.500 | 43,86 | | 56,14 |
| 7.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 12 | 12 | 100,00 | 458.222.800 | 355.708.130 | 77,63 | | 22,37 |
| 7.3 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 4 | 4 | 100,00 | 840.550.312 | 786.144.264 | 93,53 | | 6,47 |
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang | 113 | 99,12 | 99,12 | 929.507.277 | 896.762.133 | 96,48 | | 2,64 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------|--|
| | Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | |
| 8.1 | Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan | 41 | 40 | 97,56 | 642.350.840 | 615.575.324 | 95,83 | 1,73 | |
| 8.2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5 | 5 | 100,00 | 16.869.200 | 14.979.500 | 88,80 | 11,2 | |
| 8.3 | Pemeliharaan/Rehab Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 5 | 5 | 100,00 | 211.173.237 | 207.258.259 | 98,15 | 1,85 | |
| 8.4 | Pemeliharaan/Rehab Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 62 | 62 | 100,00 | 59.114.000 | 58.949.050 | 99,72 | 0,28 | |
| 9 | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 106 | 95,28 | 95,28 | 29.542.019.817 | 28.121.930.679 | 95,19 | 0,09 | |
| 9.1 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 50 | 50 | 100,00 | 28.411.460.697 | 27.066.650.435 | 95,27 | 4,73 | |
| 9.2 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 6 | 6 | 100,00 | 951.255.500 | 897.741.000 | 94,37 | 5,63 | |
| 9.3 | Pelaksanaan Medical Check up | 50 | 45 | 90,00 | 179.303.620 | 157.539.244 | 87,86 | 2,14 | |
| 10 | Layanan Administrasi DPRD | 21 | 100,00 | 100,00 | 4.971.471.006 | 4.964.182.294 | 99,85 | 0,18 | |
| 10.1 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 20 | 20 | 100,00 | 4.771.603.740 | 4.764.415.540 | 99,85 | 0,15 | |
| 10.2 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | 1 | 1 | 100,00 | 199.867.266 | 199.766.754 | 99,95 | 0,05 | |
| II | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | 100 | 100 | 92,27 | 24.279.567.927 | 22.969.956.634 | 91,23 | 1,04 | |
| 1 | Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD | 15 | 15 | 100,00 | 6.574.287.880 | 6.485.421.518 | 98,65 | 1,35 | |
| 1.1 | Penyusunan dan Pembentukan Program Pembahasan Perda | 1 | 1 | 100,00 | 3.373.596.300 | 3.343.403.600 | 99,11 | 0,89 | |
| 1.2 | Pembahasan Rancangan perda | 8 | 8 | 100,00 | 2.228.421.200 | 2.209.878.534 | 99,17 | 0,83 | |
| 1.3 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan | 1 | 1 | 100,00 | 349.634.980 | 321.927.284 | 92,08 | 7,92 | |
| 1.4 | Fasilitasi Penyusunan/Naskah Akademik | 4 | 4 | 100,00 | 605.687.800 | 596.478.600 | 98,48 | 1,52 | |
| 1.5 | Penyusunan Tata tertib | 1 | 1 | 100,00 | 16.947.600 | 13.733.500 | 81,04 | 18,96 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|----|--------|--------|---------------|---------------|-------|--------|
| 2 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | 5 | 5 | 100,00 | 4.226.193.250 | 4.053.081.062 | 95,90 | 4,1 |
| 2.1 | Pembahasan KUA dan PPAS | 1 | 1 | 100,00 | 785.901.400 | 780.058.600 | 99,26 | 0,74 |
| 2.2 | Pembahasan KUA dan PPAS Perubahan | 1 | 1 | 100,00 | 1.021.289.350 | 1.004.329.800 | 98,34 | 1,66 |
| 2.3 | Pembahasan APBD | 1 | 1 | 100,00 | 757.607.800 | 752.510.700 | 99,33 | 0,67 |
| 2.4 | Pembahasan APBD Perubahan | 1 | 1 | 100,00 | 724.919.300 | 687.189.100 | 94,80 | 5,2 |
| 2.5 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 | 1 | 100,00 | 936.475.400 | 828.992.862 | 88,52 | 11,48 |
| 3 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 64 | 29 | 45,31 | 1.243.698.000 | 744.936.680 | 59,90 | -14,59 |
| 3.1 | Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum | 16 | 6 | 37,50 | 270.645.400 | 152.637.600 | 56,40 | -18,9 |
| 3.2 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | 16 | 7 | 43,75 | 330.979.700 | 193.427.100 | 58,44 | -11,69 |
| 3.3 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Masyarakat | 16 | 7 | 43,75 | 352.049.900 | 221.076.480 | 62,80 | -19,05 |
| 3.4 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | 16 | 9 | 56,25 | 290.023.000 | 177.795.500 | 61,30 | -5,05 |
| 4 | Peningkatan Kapasitas DPRD | 86 | 84 | 96,55 | 3.549.479.380 | 3.378.373.069 | 95,18 | 1,37 |
| 4.1 | Bimtek DPRD | 4 | 4 | 100,00 | 1.843.614.400 | 1.780.979.700 | 96,60 | 3,4 |
| 4.2 | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 69 | 69 | 100,00 | 1.329.136.600 | 1.268.066.369 | 95,41 | 4,59 |
| 4.3 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 4 | 4 | 100,00 | 102.080.436 | 96.584.000 | 94,62 | 5,38 |
| 4.4 | Penyediaan tenaga Ahli Fraksi | 7 | 7 | 100,00 | 179.126.224 | 169.525.000 | 94,64 | 5,36 |
| 4.5 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 12 | 35 | 291,67 | 95.521.720 | 63.218.000 | 66,18 | 225,49 |
| 5 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 53 | 100,00 | 100,00 | 3.929.420.905 | 3.643.171.400 | 92,72 | 7,28 |
| 5.1 | Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD | 50 | 50 | 100,00 | 101.275.418 | 94.584.500 | 93,39 | 6,61 |
| 5.2 | Pelaksanaan Reses | 3 | 3 | 100,00 | 3.828.145.487 | 3.548.586.900 | 92,70 | 7,3 |
| 6 | Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD | 1 | 100,00 | 100,00 | 716.388.980 | 670.604.331 | 93,61 | 6,39 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|---------------|----------------------|----------------------|--------------|------|
| 6.1 | Pengawasan Kode Etik DPRD | 1 | 1 | 100,00 | 716.388.980 | 670.604.331 | 93,61 | 6,39 |
| 7 | Pembahasan Kerja sama Daerah | 48 | 48 | 100,00 | 572.341.600 | 539.447.000 | 94,25 | 5,75 |
| 7.1 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | 48 | 48 | 100,00 | 572.341.600 | 539.447.000 | 94,25 | 5,75 |
| 8 | Fasilitasi Tugas DPRD | 17 | 17 | 100,00 | 3.467.757.932 | 3.454.921.574 | 99,63 | 0,37 |
| 8.1 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 5 | 5 | 100,00 | 1.577.067.093 | 1.568.943.231 | 99,48 | 0,52 |
| 8.2 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 12 | 12 | 100,00 | 1.890.690.839 | 1.885.978.343 | 99,75 | 0,25 |

Uraian penjelasan tabel :

Dengan mengacu pada program dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 maka dengan spesifik dapat diketahui terdapat efisiensi realisasi kinerja dengan membandingkan realisasi anggaran Sekretariat DPRD pada program utama dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, khususnya pada sub kegiatan Kajian Perundang-undangan, Penyusunan Tata tertib DPRD, pembahasan pertanggungjawaban APBD, Pelaksanaan Reses dan penyelenggaraan Hubungan Masyarakat memiliki tingkat Efisiensi diatas nilai 5 hal ini membuktikan bahwa Indikator Kinerja Sekretariat DPRD berjalan Optimal dengan Anggaran kegiatan dibawah 100%.

Kinerja Sasaran : “Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD” Dengan indikator “Nilai IKM Pelayanan Sekretariat DPRD” tercapai 81,27% dari target, sedangkan capaian penggunaan anggaran sebesar 95,38% dari pagu anggaran. Dengan demikian maka didapat efisiensi sebesar 4,76 %,-

Rata-rata capaian kinerja seluruh sasaran strategis Sekretariat DPRD Kab. Sumenep Sebesar 100,14%, dengan capaian penggunaan anggaran 95,38% dari total pagu anggaran. Berdasarkan perbandingan capaian kinerja dengan capaian penggunaan anggaran maka Sekretariat DPRD Kab. Sumenep dalam mewujudkan kinerja tahun 2023 berhasil melakukan efisiensi sebesar 2,39 % senilai Rp. 3.223.096.790,-

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 94,5% (Sangat Tinggi)
- Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat DPRD terhadap Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,14% (Sangat Tinggi)
- Sasaran Program Meningkatnya Capaian Kinerja Sekretariat DPRD terdiri dari 1 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 97,77% (Sangat Tinggi)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 69.707.022.658,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 66.483.925.868,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 95,38% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 4,62%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumenep kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sumenep.

Kabupaten Sumenep, Pebruari 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H. FAJAR RAHMAN, M.Si

NIP. 19640521 199203 1 004

Pembina Utama Muda





DAERAH KAL. XI 0107

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP

JL. TRUNOJOYO NO.124 TELP./0328/644344
SUMENEP